

# PENERAPAN PRINSIP AKAD MURABAHAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DIKAITKAN DENGAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG

(Hanafi Syahputra Harsian, 1220123022, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 106 Halaman)

## ABSTRAK

Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah wujud nyata dari semangat bermuamalah, serta untuk memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mengelola keuangan secara syariah, perjalanan bank syariah semakin mendapat dukungan dari pemerintah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 17 Juni 2008 lalu. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dikatakan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Murabahah atau jual beli adalah salah satu jenis akad yang lazim ditemui dalam produk penyaluran dana bank syariah. Masyarakat yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan selama ini telah terbiasa dengan prinsip pembiayaan secara konvensional sehingga masih sangat minim pemahamannya tentang produk-produk perbankan syariah khususnya tentang akad murabahah dalam perjanjian pembiayaan modal kerja. Untuk itu penulis menilai perlu dilakukan penelitian apakah prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang diolah dan dianalisis, dengan tujuan : Bagaimanakah penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang dan Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari Unit Usaha Syariah dalam menangani permasalahan penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang. Metode penelitian menggunakan pendekatan bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Berdasarkan hasil pembahasan dari penulisan tesis ini maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang sebagian besar sudah memenuhi prinsip akad murabahah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam teknis pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum memenuhi prinsip akad murabahah dan peran DPS masing kurang optimal karena terhambat beberapa aspek baik aspek internal dan aspek eksternal Bank Nagari.

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, Pengawasan.

PENERAPAN PRINSIP AKAD MURABAHAH PADA PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DIKAITKAN DENGAN PERAN DEWAN  
PENGAWAS SYARIAH DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG

(Hanafi Syahputra Harsian, 1220123022, Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 106 Page)

ABSTRACT

The existence of Islamic banking is a realpresentation of the muamalat spirit, and to facilitate the demand of people for financial management based on shariah, the journey of islamic banking is getting more support from government since the enactment of act number 21 of 2008 concerning Islamic banking on June 17 2008. According to article 1 point (7) of act number 21 of 2008 concerning Islamic banking, the definition of Islamic banking is bank conducting business based on sharia principles, consisting of shariah commercial bank and shariah rural bank. Murabahah or sale and purchase transaction is a common type of Islamic banking distribute financing product. Most people who are using financial facilities from bank are familiar to conventional financial principle but lack of understanding of Islamic bank product especially murabahah in working capital financing agreement. That is why the writer think that it is necessary to conduct a research to find out whether the implementation of murabahah in working capital financing agreement at Bank Nagari Syariah Padang branch is comply with shariah requirement. The research is conducted to collect data and then processed and analyzed in order to find out : How is the implementation of murabahah principle in working capital financing agreement in Bank Nagari Syariah Padang Branch and how is the role of shariah controlboard of Bank Nagari Syariah in dealing with problems of murabahah implementation in working capital finance agreement in Bank Nagari Syariah Padang Branch. The research method is using empirical jurisdiction approach, which is a research to describe the currently applied law, compared to the theory of law and practical implementation of positive law. According to the result of this thesis can be concluded that the implementation of murabahah principle in working capital financing agreement in Bank Nagari Syariah Padang Branchin general comply with the requirement of murabahah principle and with the law, but in the implementation technique there is still a few things that does not comply with murabahah principle and the role of DPS is not optimal because of limitationboth form internal and external of Bank Nagari Syariah.

Key words : Finance, Murabahah, Control